

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau yang disingkat dengan LKPD merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran, laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. LKPD disusun dengan berpedoman pada SAP. LKPD yang berkualitas seperti berikut: “Harus memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yakni: (1) Relevan, (2) Andal, (3) Dapat dibandingkan, dan (4) dapat dipahami, dengan menerapkan kreterian tersebut dalam laporan keuangan yang disajikan berarti pemerintah daerah dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam ISSN : 2337-3067 E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 5.3 (2016) : 403-428 405 pengelolaan keuangan daerah. LKPD setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD, artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberi Pendapat/TMP, (PP No.24 Tahun 2005).

Setiap Instansi Pemerintah yang didirikan pada dasarnya tidak hanya untuk mendapatkan laba yang maksimum, akan tetapi juga melayani, dan meningkatkan kepuasan konsumen serta menjaga dan melaksanakan aktivitas didalam perusahaan. Untuk mencapai tujuan, sebuah perusahaan memerlukan suatu pedoman yang berupa tugas, wewenang, dan tanggungjawab bagi masing-masing bagian organisasi secara jelas dan tepat (Handayani, 2010).

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut telah memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan dimaksud diantaranya adalah keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran. Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu kegiatan yang akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia. Kewajiban Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menyusun laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam praktiknya kini diwarnai dengan munculnya fenomena menguatnya tuntutan akuntabilitas atas organisasi public baik di pusat maupun di daerah. Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang

dilaksanakan secara periodik. Bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan 3 pemerintah sebagai salah satu organisasi sektor publik adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Pengendalian Internal sangat penting dilakukan pada organisasi sektor publik karena memiliki tujuan bukan digunakan untuk mencari profit melainkan guna meningkatkan kualitas publik dan digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja pada periode yang lalu serta sebagai dasar penyusunan strategi untuk selanjutnya (Aini, 2018). Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan deskripsi yang cukup jelas mengenai pendapatan. Dalam peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/ Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006/Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 disebutkan bahwa pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Komisi, rabat, potongan, atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya

merupakan pendapatan daerah. Pendapatan daerah dirinci menurut organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan.

Rumah Sakit merupakan salah satu bentuk dari Badan Layanan Umum dalam Instansi pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2005 pasal 1 disebutkan: “Badan Layanan Umum adalah Instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip dan produktifitas”. Rumah Sakit Badan Pelayanan Umum merupakan bagian dari instansi pemerintahan umum yang aktivitasnya juga melakukan penjualan barang atau jasa sama dengan yang dilakukan perusahaan orientasi laba (profit organization) pada umumnya. Beda halnya dengan pemerintah daerah yang sama sekali tidak berorientasi pada laba (non profit organization) karena berbasis anggaran dimana dana disediakan untuk dihabiskan sesuai anggaran yang tersedia. Perlu diketahui bahwa BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan. Rumah Sakit Badan Layanan Umum dalam menyusun laporan keuangan tahunannya membuat dua jenis laporan keuangan yaitu laporan keuangan berdasarkan PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan laporan keuangan berdasarkan peraturan menteri keuangan No.76 Tahun 2008.

Fenomena yang terkait dengan penelitian ini yaitu adanya penyelewengan yang dilakukan oleh pegawai RSUD Dolopo dan RSUD Caruban. Ketiga tersangka kasus dugaan korupsi alat kesehatan di Dinas

Kesehatan Kabupaten Madiun tahun 2011 mengajukan pra peradilan melalui penasihat hukumnya. Mereka menggugat Kejaksaan Mejayan dan menilai kasus tersebut janggal dalam penetapan status hukumnya. Sementara, pihak Kejaksaan Mejayan, Kabupaten Madiun, telah melimpahkan kasus tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk ditindaklanjuti. Dalam kasus tersebut, kejaksaan menduga terdapat penyalahgunaan keuangan negara atas proyek pengadaan alat kesehatan senilai Rp4,5 miliar yang ditangani Dinas Kesehatan untuk RSUD Dolopo pada tahun 2011. Pengadaan 22 alat kesehatan tersebut dilakukan saat terjadi perubahan status Puskesmas Dolopo menjadi RSUD Dolopo, sehingga membutuhkan peralatan baru untuk mendukung operasional rumah sakit (www.jatim.antaranews.com). Adanya penyalahgunaan keuangan tersebut bertentangan dengan prinsip sistem pengendalian internal daerah yaitu semakin tinggi tingkat pengendalian maka akan semakin rendah tingkat fraud atau penyelewengan dan kecurangan.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Sistem Pengendalian Internal Daerah (SPID) terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan”** (Studi pada RSUD Dolopo dan RSUD Caruban).

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan?

2. Apakah Sistem Pengendalian Internal Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan?
3. Apakah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan?

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan Penelitian :

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang ada, maka dapat ditentukan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal Daerah Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan.
3. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Daerah Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan.

Manfaat Penelitian :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi peneliti sendiri maupun bagi pihak-pihak yang terkait. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam ilmu akuntansi mengenai Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Sistem Pengendalian Internal Daerah (SPID).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemecahan masalah serta memberikan dampak langsung terhadap pembelajaran mengenai Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Sistem Pengendalian Internal Daerah (SPID).

a. Instansi Pendidikan

Penelitian ini sebagai informasi untuk penelitian lebih lanjut terutama mengenai pengaruh pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Sistem Pengendalian Internal Daerah (SPID) terhadap kualitas laporan keuangan pada RSUD se Kabupaten Madiun.

b. Bagi Rumah Sakit

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi manajer atau kepala bagian setingkat manajer organisasi dalam mengambil kebijakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Sistem Pengendalian Internal Daerah (SPID) terhadap kualitas laporan keuangan.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan bisa menambah informasi dan wawasan bagi penulis mengenai pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Sistem Pengendalian Internal Daerah (SPID) pada RSUD se Kabupaten Madiun.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini bisa digunakan sebagai sumber referensi dan masukan dalam penelitian ilmiah tentang pengaruh pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Sistem Pengendalian Internal Daerah (SPID) terhadap kualitas pelaporan keuangan pada RSUD se Kabupaten Madiun.

